



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021**



**RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2022**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 ini dapat kami susun

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan disusun sebagai bahan untuk penyusunan APBD Kabupaten Pekalongan dan juga digunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan kami menyadari tentunya tidak lepas dari kekurangan, untuk itu kami mohon saran dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan guna perbaikan masa yang akan datang.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, semoga bermanfaat.

Kajen, 30-Juli - 2021

a.n. BUPATI PEKALONGAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH



Drs. BUDI SANTOSO, MSI
Pembina Utama Madya
NIP. 196312241991031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Fungsi Strategis	2
C. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	3
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	4
E. Permasalahan Utama yang dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategik	7
B. Perjanjian Kinerja	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran	40
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	41
B. Prestasi yang diraih	41
C. Hal – hal yang ingin di capai di tahun mendatang.....	42

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BAB I
PENDAHULUAN**

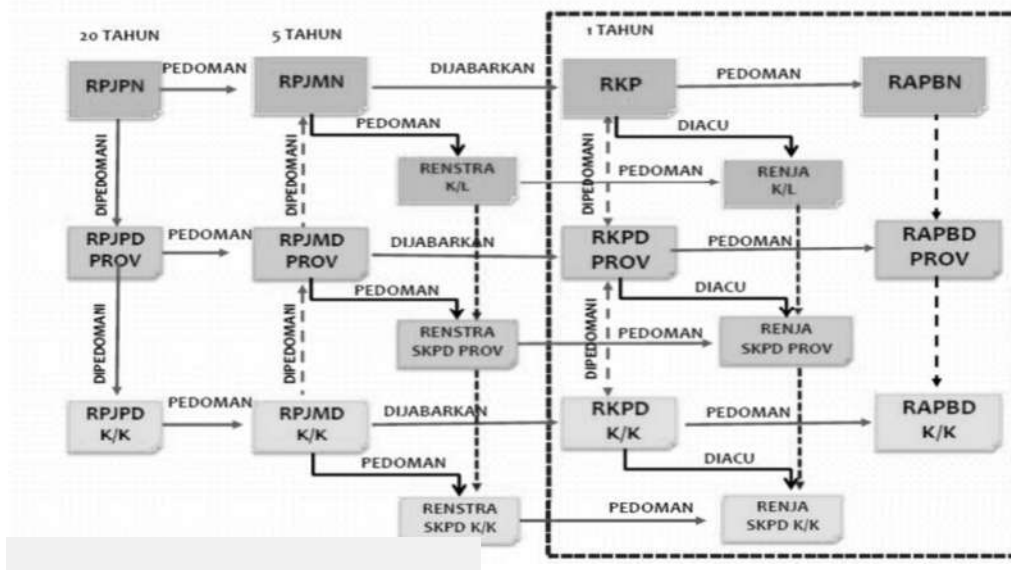
A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah meliputi :

1. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan pedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar di bawah ini.



Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

Gambar 1.1
Kedudukan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Selanjutnya Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2022 dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Renja Badan Perencanaan Daerah Dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2022;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan. Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94)
25. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021;
26. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

2. Tujuan :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2021-2026;
- b. Sebagai pedoman kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
- f. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

D. Sistematika

Sistematika Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan berisikan penjelasan mengenai:

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana kerja dan pendanaan yang mana matrik diprint out dari SIPD.

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen jangka menengah.

Kualitas penyusunan Renja Sekretariat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya, maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah.

Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Sekretariat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Sekretariat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 dapat dilihat dari capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan serta capaian terhadap kinerja yakni merupakan akumulasi dari capaian keuangan dan fisik. Adapun capaian evaluasi rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Capaian keuangan pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2020 adalah sebesar 85,11%.
2. Capaian kinerja, yakni tingkat pencapaian terhadap keluaran/output yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan yakni sebesar 97,25%.

Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp.13.685.441.000,- Realisasi keuangan Rp.13.169.238.525,- . Sedangkan anggaran belanja langsung untuk membiayai 12 Program dan 96 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.18.971.542.421,-, Realisasi keuangan sebesar Rp.16.147.479.299,-. Adapun capaian keuangan program/kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

- a. Fasilitas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan anggaran Rp.454.141.880,- realisasi keuangan Rp.450.100.000,- (99,11%);
- b. Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji dengan anggaran Rp.492.258.176,- realisasi keuangan Rp.0,- (0%);

- c. Fasilitas Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan dengan anggaran Rp.2.497.136.600,- realisasi keuangan Rp.1.947.516.834,- (77,99%);
2. **Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM**
 - a. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dengan anggaran Rp.37.074.250,- realisasi keuangan Rp.35.068.533,- (94,59%)
 - b. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dengan anggaran Rp.113.885.000,- realisasi keuangan Rp.111.185.926,- (97,63%)
 - c. Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi dengan anggaran Rp. 280.440.000,- realisasi keuangan Rp.132.339.636,- (47,19%)
3. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**
 - a. Publikasi Peraturan Perundang – undangan dengan anggaran Rp. 13.378.700,- realisasi keuangan Rp.12.962.622,- (96,89%);
 - b. Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU dengan anggaran Rp. 4.377.500,- realisasi keuangan Rp. 4.377.500,- (100 %);
 - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan anggaran Rp. 25.196.200,- realisasi keuangan Rp.24.659.521,- (97,87%);
 - d. Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan anggaran Rp. 68.649.900,- realisasi keuangan Rp. 68.649.900,- (100 %);
 - e. Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda) dengan anggaran Rp. 22.933.100,- realisasi keuangan Rp. 22.933.100,- (100 %);
4. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**
 - a. Fasilitas, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah dengan anggaran Rp. 91.600.000,- realisasi keuangan Rp.67.921.400,- (74,15%);
 - b. Fasilitas, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi dengan anggaran Rp.99.000.000,- realisasi keuangan Rp.61.152.300,- (61,77%);
 - c. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan anggaran Rp. 216.146.000,- realisasi keuangan Rp.214.589.749,- (99,28%);
 - d. Fasilitas dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat dengan anggaran Rp. 184.804.700,- realisasi keuangan Rp.175.083.973,- (94,74%);
 - e. Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan anggaran Rp. 277.624.500,- realisasi keuangan Rp.265.880.984,- (95,77%);

- f. Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD, BPD Dan Kepala Desa dengan anggaran Rp. 24.889.000,- realisasi keuangan Rp.23.739.128,- (95,38%);

5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

- a. Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dengan anggaran Rp. 150.160.500,- realisasi Rp.137.111.553,-(91,31%)

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

- a. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya dengan anggaran Rp. 526.800.000,- realisasi Rp.397.259.880,- (75,41%);
- b. Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan anggaran Rp. 1.304.511.800,- realisasi Rp.1.152.014.371,-(88,31%);
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dengan anggaran Rp. 92.240.000,00,- realisasi Rp.82.185.840,- (89,1%);

7. Program Capaian Kinerja Aparatur

- a. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dengan anggaran Rp.109.467.632,- realisasi Rp.108.580.944,- (99,19%);
- b. Analisis Jabatan dengan anggaran Rp. 70.414.800,- realisasi Rp.64.302.795,- (91,32%);
- c. Pengembangan e-SAKIP dengan anggaran Rp. 200.608.900,- realisasi Rp.185.503.050,- (92,47%);
- d. Evaluasi Kelembagaan dengan anggaran Rp. 60.054.000,- realisasi Rp.54.667.156,- (91,03%);
- e. Reformasi Birokrasi dengan anggaran Rp.24.364.000,- realisasi Rp.22.239.606,- (91,65%);

8. Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam

- a. Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 52.000.000,00,- realisasi Rp.70.131.509,- (82,18%);
- b. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) dengan anggaran Rp.65.000.000,- realisasi Rp. 22.977.500 (75,34%);

9. Program Pengendalian Pembangunan

- a. Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kabupaten/ Kota dan Tugas Pembantu dengan anggaran Rp. 92.226.200,00,- realisasi Rp.89.994.326,- (97,58%);

- b. Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatandengan anggaran Rp. 179.461.500,- realisasi Rp.136.947.071,- (76,31%);
- c. Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Yang Terkaitdengan anggaran Rp. 68.339.000,-,- realisasi Rp. 68.339.000,- (100,00%);
- d. Sewa Bandwidth dengan anggaran Rp. 193.758.000,- realisasi Rp. 193.758.000,- (100%);
- e. Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan anggaran Rp. 700.487.130,-,- realisasi Rp.667.774.381,- (95,33%);
- f. Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasadengan anggaran Rp. 64.750.700,- realisasi Rp.63.005.270,- (95,76%);
- g. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dengan anggaran Rp. 168.570.000,-,- realisasi Rp.160.731.495,- (95,35%);

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 1.150.000.000,- realisasi Rp.1.010.275.000,- (87,85%);
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantordengan anggaran Rp.382.757.700,- realisasi Rp.341.764.350,- (89,29%);
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan anggaran Rp. 78.750.000,- realisasi Rp.57.676.500,- (73,24%);
- d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran Rp.303.150.000,- realisasi Rp.275.745.240,- (90,96%);
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantordengan anggaran Rp. 131.944.770,- realisasi Rp. 131.944.770,- (100 %);
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 117.741.000,- realisasi Rp.110.982.667,- (94,26%);
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 971.345.100,- realisasi Rp.947.935.683,- (97,59%);
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dengan anggaran Rp. 835.250.000,- realisasi Rp.814.786.375,- (75,68%);
- i. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dengan anggaran Rp.1.486.929.840,- realisasi Rp.1.450.499.083,- (97,55%);
- j. Penyediaan Peralatan Kantor dan rumah Tangga dengan anggaran Rp. 655.060.800,- realisasi Rp.579.073.747,- (88,40%);

11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Masjid Al Muhtarom Kajen dengan anggaran Rp. 150.796.000,- realisasi Rp.131.192.520,- (87%);
- b. Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya dengan anggaran Rp. 25.940.000,-, realisasi Rp.24.824.580,- (95,70%);
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran Rp. 788.594.000,- realisasi Rp.786.780.234,- (99,77%);
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan anggaran Rp. 1.584.000.000,- realisasi Rp. 1.231.876.800,- (77,77%);
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 618.816.000,-, realisasi Rp.581.315.750,- (89,94%);
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 113.062.600,- realisasi Rp.96.408.479,- (85,27%)
- g. Pemeliharaan Aplikasi Sistem Pelaporan dengan anggaran Rp.79.560.343,- realisasi Rp. 79.560.343,- (100 %);
- h. Pengadaan Peralatan Kantor,RT dan Mebelair dengan anggaran Rp. 306.240.200,- realisasi Rp.272.737.522,- (89,06%);
- i. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (hukum) dengan anggaran Rp.13.000.000,- realisasi Rp.13.000.000;
- j. Penataan Kantor Setda dengan anggaran Rp. 7.000.000,- realisasi Rp.7.000.000,- (100 %);

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian dengan anggaran Rp. 144.855.400,- realisasi Rp.117.839.868,- (81,35%);

Kesimpulan

Melihat Uraian diatas, Capaian Kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 tidak mencapai 100% tetapi sebesar 97,25%, penurunan capaian kinerja ini dikarenakan Kegiatan Pelayanan dan Pelaksanaan Ibadah Haji tidak dapat dilaksanakan.

Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid 19 dan terbitnya kebijakan pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga kegiatan yang bersifat kerumunan massa ditiadakan serta adanya refocusing anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak jadi dilaksanakan.

Dengan adanya pemutakhiran Peraturan Permendagri No. 90 tahun 2019 terjadi perubahan nomenklatur yang semula pada tahun 2020 jumlah Program pada Sekretariat Daerah sejumlah 8 (Delapan) Program menjadi 3 (Tiga) Program pada

tahun 2021. Adapun Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2021 dan Pencapaian Renstra Tahun 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Juni Tahun 2021
Kabupaten Pekalongan

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4 01	SEKRETARIAT DAERAH										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2021)	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun Tepat Waktu	-	-	-	-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Orpeg
4 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
00 00 00 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (2020)	Jumlah Bulan Pemenuhan Honor PA dan KPA Dalam Rangka Terlaksananya Tertib Administrasi	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD(2021)							12 bulan			Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
00 00 00 01.039	Penyediaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (2020)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan peralatan kantor dan rumah tangga	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga(2021)							12 bulan			Umum
00 00 00 01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor (2020)	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor(2021)		72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan(2021)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
00 00 00 01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman (2020)	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu (2021)							12 bulan			Umum
00 00 00 01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (2020)	Jumlah bulan terpenuhinya dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00 00 00 02.102	Pengadaan Peralatan Kantor, RT dan Mebelair (2020)	Jumlah bulan pemenuhan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga dan mebeler	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2021)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Listrik, Telepon dan Air	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2021)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
00 00 00 01.038	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (2020)	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam pembayaran honor tenaga teknis dan administrasi (Outsourcing)	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00 00 00 02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (2020)	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
00 00 00 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (2020)	Jumlah bulan pemenuhan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	umum
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2021)							12 bulan			Umum
00 00 00 02.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (2020)	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan 6 unit rumah dinas jabatan dan 2 gedung kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
00 00 00 02.123	Penataan Kantor Setda (2020)	Jumlah lokasi penataan ruangan selama 12 bulan	17 Lokasi	3 Lokasi	- Lokasi	- Lokasi	-	1 Lokasi	13 Lokasi	76,47	Umum
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2021)							1 Lokasi			Umum
00 00 00 02.062	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2020)	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum/ Orpeg
4 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2021)							12 bulan			Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										
04 06 16 006	Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya (2020)	Jumlah bulan pemenuhan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemda Lain dan luar negeri	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (2021)							12 bulan			Umum
4 01 01 2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah										Umum
04 06 16 008	Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati (2020)	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan harian rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Umum
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah (2021)								12 bulan		Umum
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah (2021)								12 bulan		Umum
4 01 01 2.13	Penataan Organisasi										
04 06 35 006	Analisis Jabatan (2020)	Jumlah OPD yang dievaluasi analisis jabatannya	-	27 OPD	27 OPD	27 OPD	100	27 OPD	27 OPD	100	Orpeg
04 06 35 015	Evaluasi Kelembagaan (2020)	Jumlah OPD yang dievaluasi	-	27 OPD	27 OPD	27 OPD	100	27 OPD	27 OPD	100	Orpeg

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan(2021)	Jumlah Dokumen Evaluasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						2 dokumen 2 dokumen			Orpeg
04 06 35 005	Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (2020)	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan Publik	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Orpeg
		Jumlah dokumen IKM	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Orpeg
		Jumlah peserta OPD yang mengikuti kompetisi Inovasi	3 Peserta	3 Peserta	3 Peserta	3 Peserta	100	3 Peserta	3 Peserta	100	Orpeg
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (2021)							2 Dokumen 3 Peserta			Orpeg
04 06 35 016	Reformasi Birokrasi (2020)	Jumlah Kajian Dokumen Reformasi Birokrasi	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	100	Orpeg
04 06 35 013	Pengembangan E-SAKIP (2020)	Jumlah Kajian Dokumen Laporan kinerja Instansi Pemerintah 2019 Dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Orpeg
		Jumlah Kajian Dokumen perjanjian kinerja Bupati Tahun 2020	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Orpeg
		Jumlah Kajian Dokumen rencana aksi kinerja Pemerintah daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Orpeg
		Laporan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKJIP Setda)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-	Orpeg
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (2021)							4 Dokumen			Orpeg
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi(2021)							1 Perbup			Orpeg

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00 00 00 05.051	Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian (2020)	Jumlah bulan terpenuhinya Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian Setda, arsip dan pengiriman peserta diklat formal	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	Orpeg
4 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (2021)							12 Bulan			Orpeg
4 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian (2021)							12 Bulan			Orpeg
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2021)							12 Bulan			Orpeg
4 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (2021)							2500 Record			Orpeg
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan										
04 06 16 010	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kegiatan Protokoler Acara Resmi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (2020)	Jumlah Pelayanan kegiatan protokoler Bupati dan Wakil Bupati selama 12 bulan	785 kali	512 Kali	140 Kali	118 kali	84,28	140 Kali	770 Kali	98,08	Protokol
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan(2021)							140 kali			Protokol
	Penyusunan Buku Himpunan Sambutan Bupati (2020)	Jumlah Dokumen Himpunan Sambutan Bupati Pekalongan selama 12 Bulan	5 dokumen	3 dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	- dokumen	3 dokumen	60	Protokol
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan(2021)							- dokumen			Protokol

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Usuran/BidangUsuran Pemerintahan DaerahDanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
4 01 02 2.01	Administrasi Tata Pemerintahan										
04 06 34 010	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (2020)	Jumlah dokumen LPPD kabupaten pekalongan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tapem
		Jumlah peserta bintek LPPD	- Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	100	Tapem
		Jumlah dokumen SPM kabupaten pekalongan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tapem
04 06 34 041	Fasilitasi Proses Administrasi Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD, BPD dan Kepala Desa (2020)	Tertib administrasi, pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD, anggota BPD dan Kepala Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tapem

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan(2021)							1 Dokumen (LPPD), 45 Perangkat Daerah, 1 Dokumen (SPM), 2 Dokumen (Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD, BPD dan Kepala Desa)			Tapem
04.06.34.012	Fasilitasi dan Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat (2020)	Terselenggaranya pelayanan dasar kepada masyarakat di 19 Kecamatan,	100%	19 kecamatan	19 kecamatan	19 kecamatan	100	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100	Tapem
		Jumlah dokumen data rupa bumi unsur buatan terinventarisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tapem
		Terwujudnya inovasi kecamatan dalam melayani masyarakat	100%	-	19 kecamatan	19 kecamatan	100	19 kecamatan	19 kecamatan	100	Tapem

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (2021)							4 Keg (Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, inventarisasi data rupabumi, inovasi kecamatan, fasilitasi penegasan batas daerah)			Tapem
04 06 34 036	Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (2020)	Jumlah dokumen Pelaporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1 Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	- Dokumen	1 Dokumen	100	Tapem
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (2021)							1 Kegiatan			Tapem
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat										
04 06 38 020	Fasilitasi Pembinaan Bidang Keagamaan Kabupaten Pekalongan (2020)	Jumlah Kafilah MTQ/STQ/MHQ, (kesmas)	100%	1150 Orang	- Orang	- Orang	-	50 Orang	1150 Orang	100	Kesra
		Jumlah peserta buka puasa bersama Bupati, (kesmas)	100%	1800 Anak	950 Anak	- Anak	-	- Anak	- Anak	-	Kesra
		Jumlah marbot yang difasilitasi (kesos)	100%	200 Orang	830 orang	830 orang	100	845 orang	1870 orang	100	Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		Jumlah kegiatan hari besar keagamaan (bintal)	6 Kegiatan	6 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100	Kesra			
		Jumlah kegiatan pembinaan bidang keagamaan(bintal)	100%	36 kegiatan	26 Kegiatan	26 Kegiatan	100	- Kegiatan	- Kegiatan	-	Kesra			
04	06	38	007	Pelayanan Kesehatan dan Pelaksanaan Ibadah Haji (2020)	Jumlah Jemaah Haji yang terfasilitasi transportasi dan jumlah TPHD(bintal)	100%	2120 Jemaah 7 TPHD/ TKHD	920 Jemaah	- Jemaah	-	- Jemaah	-	Kesra	
04	06	38	004	Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (2020)	jumlah peserta khitan masal dan jumlah penerima pembagian hewan kurban(kesos)	100%	200 Anak	100 Anak	- Anak	-	100 Anak	300 Anak	100	Kesra
					jumlah warga Kab. Pekalongan yang ikut mudik lebaran (kesmas)	100%	150 Orang	100 Orang	- Orang	-	- Orang	- Orang	-	Kesra
					jumlah penerima hibah/bantuan sosial (kesos)	100%	42 lembaga	21 lembaga	21 lembaga	100	19 lembaga	82 lembaga	100	Kesra
00	00	00	02.002	Pemeliharaan Rutin/berkala Masjid Al Muhtarom Kajen (bintal) (2020)	Jumlah Masjid yang terpelihara	72 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	12 Bulan	100	Kesra
00	00	00	02.012	Pengadaan komputer, printer, LCD dan perlengkapannya (2020)	Jumlah pengadaan computer	- Unit	- Unit	2 Unit	2 Unit	100	- Unit	- Unit	-	Kesra

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual(2021)							5 Kegiatan hari besar keagamaan 11 bulan pembinaan bidang keagamaan 0 haji 12 bulan pemeliharaan masjid al muhtarom			Kesra
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial(2021)							845 orang marbot 100 anak khitan 19 lembaga/yayasan penerima hibah			Kesra
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat(2021)							50 orang Kafilah MTQ, - orang peserta buka puasa			Kesra
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum										

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/BidangUrusan Pemerintahan DaerahDanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
00 00 00 05.066	Bintek Legal Drafting (2020)	Jumlah peserta Bintek Legal Drafting	- Orang	200 Orang	100 Orang	- Orang	-	- Orang	200 Orang	-	Hukum
00 00 00 05.067	Bintek Produk Hukum Desa (2020)	Jumlah peserta bintek Produk Hukum Desa	- Orang	400 Orang	565 Orang	- Orang	-	- Orang	400 Orang	-	Hukum
	Koordinasi, Kajian kerjasama dan Permasalahan PPU (2020)	Jumlah solusi atas permasalahan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan daerah melalui kajian dan studi komparasi	42 Kajian	2 Kajian	8 Kajian	8 Kajian	100	5 Kajian	15 Kajian	36	Hukum
04 06 26 030	Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah (2020)	Jumlah produk hukum daerah (Perbup) yang sinkron dengan peraturan lebih tinggi dan serasi dengan peraturan yang sederajat	240	78	68	68	100	36	182	76	Hukum
	Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Propemperda) (2020)	Jumlah peserta Rapat Kerja Program Legislasi Daerah	420 Orang	70 Orang	50 Orang	50 Orang	100	50 Orang	170 Orang	40	Hukum
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah(2021)							40 Perbup			Hukum
04 06 26 022	Penyuluhan Hukum (2020)	Jumlah peserta penyuluhan hukum	- Orang	970 Orang	304 Orang	- Orang	-	- Orang	970 Orang	-	Hukum
04 06 26 024	Pengiriman Peserta LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi (2020)	Jumlah Peserta yang dikirim ke LCC Keluarga Sadar Hukum Tingkat Bakorwil dan Provinsi	100%	5 Orang	- Orang	- Orang	-	- Orang	5 Orang	-	Hukum
	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (2020)	Jumlah peserta Rakor, Diseminasi dan Penilaian HAM	960 Orang	165 Orang	165 Orang	165 Orang	100	50 Orang	380 Orang	40	Hukum

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Usuran/BidangUsuran Pemerintahan DaerahDanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
04 06 28	Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (2020)	Jumlah perkara yang terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin	164 Perkara	37 Perkara	39 Perkara	39 Perkara	100	40 Perkara	116 Perkara	71	Hukum
04 06 28 004	Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi (2020)	Jumlah penyelesaian perkara perdata baik Litigasi maupun non Litigasi dan TUN kepada Pemda (Bupati dan OPD)	100%	6 Perkara non litigasi dan 8 sidang	1 Perkara non litigasi/litigasi	1 Perkara non litigasi/litigasi	100	4 Perkara non litigasi/litigasi	11 Perkara non litigasi/litigasi	100	Hukum
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum(2021)							- Orang 4 Perkara 40 Perkara 4 Laporan			hukum
04 06 26 005	Publikasi Peraturan Perundang-undangan (2020)	Jumlah pendistribusian sarana publikasi peraturan perundang-undangan daerah.	100%	200 Buku	100 Buku	100 Buku	100	40 Buku	340 Buku	100	hukum
		Jumlah Perda Perbup yang disosialisasikan	-	4	-	-	-	2	6	-	hukum
	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (2020)	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIIH dan arsip produk hukum daerah	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Hukum
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum (2021)							340 buku 72 bulan 340 produk hukum			Hukum
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah										

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
04 06 41 001	Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah (2020)	Jumlah Kerjasama Antar Daerah yang Terfasilitasi	-	26 naskah	20 naskah	20 naskah	100	20 naskah	66 naskah	100	Tapem
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (2021)							20 naskah			Tapem
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										
04 06 34 001	Fasilitasi, Pembinaan dan Evaluasi Perusahaan Daerah (2020)	pelaksanaan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	24 BUMD	16 BUMD	4 BUMD	4 BUMD	100	4 BUMD 29 BLUD	24 BUMD	100	Perekonomian
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (2021)							4 BUMD 29 BLUD			Perekonomian
04 06 34 014	Fasilitasi, Monev, Pengembangan Perekonomian Daerah dan Investasi (2020)	pelaksanaan pengendalian dan distribusi perekonomian daerah	100%	85%	100%	73%	73	100%	86%	86	Perekonomian
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (2021)							100%			Perekonomian
4 01 03 2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan										

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s /d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
04 06 32 005	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang terkait (2020)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan lainnya yang terkait	1100 orang	800 orang	- orang	- orang	-	100 orang	900 orang	82	Pembangunan
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan (2021)							100 Orang			Pembangunan
04 06 32 002	Koordinasi Pengendalian dan Pelaporan Kegiatan (2020)	Jumlah Bulan yang terpenuhi dalam rangka Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi, Percepatan dan Pelaporan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/Kota, DAK dan Tugas Pembantuan	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Pembangunan
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (2021)							12 Bulan			Pembangunan
04 06 32 001	Penyusunan Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan (2020)	Jumlah Buku Laporan Perkembangan Pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan Kab/Kota dan Tugas Pembantuan	2880 buku	1440 buku	672 buku	672 buku	100	576 Buku	2688 Buku	93,34	Pembangunan
		Jumlah Dokumen Visualisasi hasil pembangunan kabupaten pekalongan	6 Dokumen	4 Dokumen	- Dokumen	- Dokumen	-	1 Dokumen	5 Dokumen	83	Pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
		Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka update data pelaporan (SIMPEL) kegiatan APBD	72 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	72 bulan	100	Pembangunan	
4	01 03 2.02	03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (2021)						576 buku 1 Dokumen 12 bulan			Pembangunan	
4	01 03 2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa										
04	06 32 004	Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) (2020)	Jumlah Pengadaan barang/jasa oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1014 Paket	347 Paket	65 Paket	120 Paket	100	133 Paket	600 Paket	59,17	PBJ
4	01 03 2.03	01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (2021)						133 Paket			PBJ	
04	06 32 014	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi (2020)	Jumlah bulan pemenuhan pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	PBJ
04	06 32 003	Sewa Bandwidth(2020)	Jumlah bulan pemenuhan sewa bandwidth	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100	PBJ
4	01 03 2.03	02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (2021)						12 bulan			PBJ	
04	06 32 010	Pembinaan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (2020)	Jumlah peserta pembinaan pengelola barang/jasa	699 Orang	208 Orang	260 Orang	260 Orang	100	78 Orang	546 Orang	78,11	PBJ

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 - 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Keterangan
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (2021)							78 Orang			PBJ
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam										
04 06 33 003	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) (2020)	Terselenggaranya sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai dan Koordinasi ketentuan di bidang cukai	900 siswa	640 siswa	100 siswa	60 siswa	60	120 siswa	820 siswa	91	Perekonomian
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan (2021)							120 Orang			Perekonomian
04 06 33 001	Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (2020)	Terselenggaranya sosialisasi hemat energi dan fasilitasi koordinasi pengelolaan SDA dan LH serta terlaksananya pendampingan dan penggunaan pupuk bersubsidi, BBM dan LPG 3 Kg	900 siswa	600 siswa	150 siswa	- Siswa	-	160 siswa	760 siswa	84	Perekonomian
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air (2021)							160 siswa			Perekonomian

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Sekretariat Daerah dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

1. Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)
2. Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat bantuan (%)
3. Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu %
4. Hasil Implementasi SAKIP
5. Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)

Adapun secara rinci analisis pencapaian kinerja pelayanan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan dalam table 2.2.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	2019 (n-2)	2020 (n-1)	2021 (n)	2022 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%)	-	IKU	100%	100%	100%	-	100%	80,28%	100%	-	-
2	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yang mendapat bantuan (%)	-	IKU	100%	100%	100%	-	86,67%	92,85%	100%	-	-
3	Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu %	-	IKU	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	-
4	Hasil Implementasi SAKIP	-	IKU	B	B	BB	-	B	BB	BB	-	-
5	Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	-	IKU	60%	85%	90%	-	65%	81,25%	90%	-	-

Dari Tabel 2.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2020 sesuai dengan yang direncanakan, kecuali pada Indikator Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan yang difalisiltasi hal ini disebabkan Pandemi Covid 19 sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB sehingga kegiatan yang bersifat Kerumunan Massa ditiadakan.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan masalah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan kurang profesional. Salah satu indikator belum maksimalnya kualitas SDM dapat dilihat dari tenaga SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya masih sangat kurang misalnya, tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, analisa jabatan/kepegawaian dan arsiparis.
- b. Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah.
- c. Peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas organisasi Perangkat Daerah belum efektif baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal.
- d. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah.
- e. Belum tersediannya pemanfaatan standar operasional monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi.
- f. Sinergitas antara penyusun kebijakan dan pelaksanaan belum optimal
- g. Terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Melihat dari permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten pekalongan dimasa yang akan datang peluang dan tantangan untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah;
- b. Melaksanakan penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hokum;

- c. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk optimalisasi pendayagunaan potensi daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja;
- e. pemanfaatan standar operasional monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
- f. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan;
- g. Meningkatkan pendayagunaan pemanfaatan APBD sesuai dengan kebutuhan.

Dalam upaya mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menjadi lembaga yang mampu menjalankan peran dan tupoksinya di tengah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan secara baik, antara lain:

1. Kewenangan dan peran Sekretariat Daerah yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
2. Semakin berkembangnya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
3. Tuntutan stakeholders akan produk bidang penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berkualitas, transparan dan partisipatif
4. Ketersediaan perguruan tinggi/lembaga lain untuk terlibat sebagai mitra kerja dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Disamping adanya peluang yang dapat dimanfaatkan terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan ke depan, tantangan tersebut antara lain :

1. Kebijakan nasional/peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi penyusunan kebijakan pembangunan di daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar PD;
3. Belum optimalnya kapasitas dan komitmen PD terhadap penyusunan kebijakan;
4. Belum optimalnya hasil penyusunan kebijakan karena masih terdapatnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh PD.
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan.

D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada 2.3.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
KabupatenPekalongan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Su bkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										
	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Prosentase pemenuhan dokumen fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	100%	1.310.000.000	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan		Prosentase pemenuhan dokumen fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	100%	1.310.000.000	
1	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah dokumen Laporan Penerapan dan evaluasi SPM, dokumen LPPD, dokumen PAW, dokumen memori jabatan yang tersusun Penyusunan dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran	3 Dok 1 jenis	530.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah dokumen Laporan Penerapan dan evaluasi SPM, dokumen LPPD, dokumen PAW, dokumen memori jabatan yang tersusun Penyusunan dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran	3 Dok 1 Jenis	530.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen kajian di bidang pemerintahan	1 Dok	150.000.000	Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen kajian di bidang pemerintahan	1 Dok	150.000.000	
3	Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan	2 Dok	400.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan	2 Dok	400.000.000	
	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Prosentase Pembentukan produk hukum dan Publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100%	827.000.000	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Prosentase Pembentukan produk hukum dan Publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100%	827.000.000	
4	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Fasilitasi penanganan perkara litigasi dan non litigasi	4 Perkara	332.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Fasilitasi penanganan perkara litigasi dan non litigasi	4 Perkara	332.000.000	
			Prosentase pemberian bantuan hukum bagi warga miskin melalui LBH	40 Perkara				Prosentase pemberian bantuan hukum bagi warga miskin melalui LBH	40 Perkara		
			Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM	4 Dok				Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM	4 Dok		
			Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	357 Orang				Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum	357 Orang		

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Perda dan Perbup yang disosialisasikan	3 Perda/Perbup	150.000.000	Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Perda dan Perbup yang disosialisasikan	3 Perda/Perbup	150.000.000	
			Jumlah Perda dan Perbup yang didistribusikan	150 Perda/Perbup				Jumlah Perda dan Perbup yang didistribusikan	150 Perda/Perbup		
			Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIIH dan arsip Produk hukum Daerah	12 Bulan				Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIIH dan arsip Produk hukum Daerah	12 Bulan		
			Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang dibuat	340 Buku				Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang dibuat	340 Buku		
6	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kajian atas permasalahan Peraturan perundang-undangan	5 buah	345.000.000	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kajian atas permasalahan Peraturan perundang-undangan	5 buah	345.000.000	
			Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan harmonisasi	60 Perda/Perbup				Jumlah produk hukum daerah yang disinkronisasi dan harmonisasi	60 Perda/Perbup		
			Tersusunnya propemperda/propemperbup	2 Dok				Tersusunnya propemperda/propemperbup	2 Dok		

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah		Prosentase naskah kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	230.000.000	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah		Prosentase naskah kerjasama daerah yang terfasilitasi	100%	230.000.000	
7	Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Fasilitas kerjasama Luar negeri yang terfasilitasi	1 Keg	30.000.000	Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah fasilitas kerja sama luar negeri yang terfasilitasi	1 Keg	30.000.000	
8	Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah naskah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi	20 Naskah	200.000.000	Subkegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah naskah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi	20 Naskah	200.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	100 %	33,817,178,100	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	100 %	33,817,178,100	
9	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kegiatan dalam fasilitas kegiatan agama dan lembaga keagamaan	4 Keg	3,817,217,100	Subkegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kegiatan dalam fasilitas kegiatan agama dan lembaga	4 Keg	3,817,217,100	
10	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat	3 Keg	1,629,961,000	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat	3 Keg	1,629,961,000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyarakat, individu dan keluarga penerima hibah dan bantuan sosial	4 Keg	28,370,000,000	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyarakat, individu dan keluarga penerima hibah dan bantuan sosial	4 Keg	28,370,000,000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %		
12	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	100.000.000	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	100.000.000	
13	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Pegawai	155.000.000		Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15 Pegawai	155.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
14	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Bulan	119.000.000	Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Bulan	119.000.000	
15	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	110.000.000	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	110.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Prosentase Pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Prosentase Pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %		
16	Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.050.000.000	Subkegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.050.000.000	
17	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.089.000.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan pemenuhan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan	1.089.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase ketercapain Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %)	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
18	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	410.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekaloga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 bulan	410.000.000	
19	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	16.500.000.000	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekaloga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	16.500.000.000	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase ketercapain Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase ketercapain Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		
20	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan	1.070.000.000	Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekaloga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya fasilitas Kunjungan Tamu	12 Bulan	1.070.000.000	
21	Sukegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	110.000.000	Sukegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekaloga n	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	110.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
22	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	510.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	510.000.000	
23	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	250.000.000	Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	250.000.000	
24	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor	12 bulan	135.000.000	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor	12 bulan	135.000.000	
25	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 kali	900.000.000	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76 kali	900.000.000	
26	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah arsip dinamis dan inaktif yang dikelola dalam satu tahun	2500 Dokumen	50.000.000	Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah arsip dinamis inaktif yang dikelola	2500 Dokumen	50.000.000	
	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Prosentase bulan pemenuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Prosentase bulan pemenuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%		

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
27	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Kepala Daerah	12 bulan	860.000.000	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Kepala Daerah	12 bulan	860.000.000	
28	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	580.000.000	Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Tangga Wakil Kepala Daerah	12 bulan	580.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase Kegiatan keprotokol yang terfasilitasi	100%		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Prosentase Kegiatan keprotokol yang terfasilitasi			
29	Subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 bulan	200.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 bulan	200.000.000	
30	Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Kegiatan Protokol yang terfasilitasi	140 kali	150.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Kegiatan Protokol yang terfasilitasi	140 kali	150.000.000	
31	Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan terpenuhinya pendokumentasian kegiatan	12 bulan	200.000.000	Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah bulan terpenuhinya pendokumentasian kegiatan	12 bulan	200.000.000	

Pimpinan

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %)	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase ketercapaian Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		
32	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	677.386.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	677.386.000	
33	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	12 bulan	750.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	12 bulan	750.000.000	
34	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeler	12 bulan	60.000.000	Subkegiatan Pemeliharaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeler	12 bulan	60.000.000	
35	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Bulan Terpenuhinya pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.200.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Bulan Terpenuhinya pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	1.200.000.000	-

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
36	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	1,000,000,000	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12 bulan	1,000,000,000	-
	Kegiatan Penataan Organisasi		Prosentase Perangkat Daerah berkinerjanya baik	100%	1.459.000.000	Kegiatan Penataan Organisasi		Prosentase Perangkat Daerah berkinerjanya baik	100%	1.459.000.000	
37	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	200.000.000	Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	200.000.000	
38	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen SAKIP Tingkat Pemerintah Daerah yang tersusun	4 dokmen	305.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen SAKIP Tingkat Pemerintah Daerah yang tersusun	4 dokmen	305.000.000	
39	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen kelembagaan, Anjab dan ABK yang tersusun	3 Dokumen	350.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen kelembagaan, Anjab dan ABK yang tersusun	3 Dokumen	350.000.000	
40	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokuman pelayanan publik dan tata laksana	3 Dokumen	354.000.000	Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokuman pelayanan publik dan tata laksana	3 Dokumen	354.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
41	Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	1 Dokumen	250,000,000	Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	1 Dokumen	250,000,000	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Ketercapaian Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.740.000.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Prosentase Ketercapaian Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.740.000.000	
42	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	560.000.000	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 unit	560.000.000	
43	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi	59 unit	900.000.000	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang terpenuhi	59 unit	900.000.000	
44	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pengadaan Mebel	30 unit	280.000.000	Subkegiatan Pengadaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Pengadaan Mebel	30 unit	280.000.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
45	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.183.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.183.000.000	
46	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	175.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Terpenuhiya Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	175.000.000	
47	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang hasil Pengadaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum	74 orang	1.960.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Orang hasil Pengadaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum	74 orang	1.960.000.000	
48	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	600.000.000	Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	600.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Prosentase Dokumen Perencanaan, Peng anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat Waktu	100%)	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Prosentase Dokumen Perencanaan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat Waktu	100%		
49	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	30.000.000	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	30.000.000	
50	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	27,500,000	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Renstra dan Renja)	2 Dokumen	27,500,000	
			Jumlah SK Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah	6 SK				Jumlah SK Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah			
51	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalon gan	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalonga n	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang tersusun	1 dokumen	25.000.000	

Kinerja SKPD

Realisasi

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting	
	Program/kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan					
	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Prosentase laporan fisik seluruh OPD	100%	580.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Prosentase laporan fisik seluruh OPD	100%	580.000.000		
52	Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/ Kota, DAK, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekonsentrasi	4 Dokumen	283.000,000	Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/ Kota, DAK, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekonsentrasi	4 Dokumen	283,000,000		
			Jumlah dokumen Visualisasi hasil pembangunan Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen				Jumlah dokumen Visualisasi hasil pembangunan Kabupaten Pekalongan	1 Dokumen			
			Update data pelaporan (SIMPEL) kegiatan APBD	12 Bulan				Update data pelaporan (SIMPEL) kegiatan APBD	12 Bulan			

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
53	Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka koordinasi, Pengendalian, Evaluasi, Percepatan dan pelaporan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/ Kota, DAK Dan Tugas	12 Bulan	262.000.000	Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah bulan yang terpenuhi dalam rangka koordinasi, Pengendalian, Evaluasi, Percepatan dan pelaporan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/ Kota, DAK Dan Tugas	12 Bulan	262.000.000	
54	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah SK Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah dan SK Sekda tentang Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah	9 SK	35.000.000	Subkegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah SK Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah dan SK Sekda tentang Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah	9 SK	35.000.000	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Prosentase Kebijakan Perekonomian daerah yang dilakukan monev	100%	435.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Prosentase Kebijakan Perekonomian daerah yang dilakukan monev	100%	435.000.000	
55	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	33 Kegiatan	120.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	33 Kegiatan	120.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
56	Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPID yang dilaksanakan	4 Kegiatan	250.000.000	Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPID yang dilaksanakan	4 Kegiatan	250.000.000	
57	Subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPAKD yang dilaksanakan	4 Kegiatan	65.000.000	Subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPAKD yang dilaksanakan	4 Kegiatan	65.000.000	
	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan Monev	100 %	425,000,000	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan Monev	100 %	425,000,000	
58	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Kegiatan	300.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Kegiatan	300.000.000	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	IndikatorKinerja	Target capaian	Paguindikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
59	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Kegiatan	55.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	4 Kegiatan	55.000.000	
60	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Energi dan Air	4 Kegiatan	70.000.000	Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Energi dan Air	4 Kegiatan	70.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	100 %	2.100.000.000	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. Pengadaan Barang Dan Jasa	100 %	2.100.000.000	
61	Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta pembinaan pelaku pengadaan barang/ jasa	425 Orang	150.000.000	Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah peserta pembinaan pelaku pengadaan barang/ jasa	425 Orang	150.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Hasil Analisis Kebutuhan (Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019)					Catatan Penting
	Program/kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
62	Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan aplikasi sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	1 Dokumen	450.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah Dokumen Pengelolaan aplikasi sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	1 Dokumen	450.000.000	
63	Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. PBJ	195 Paket	1.500.000.000	Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab.Pekalongan	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. PBJ	195 Paket	1.500.000.000	

Kesimpulan

Melihat tabel diatas, bahwa Analisis kebutuhan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, telah sesuai dan memperhatikan Rancangan Awal RKPD sesuai Pemutakhiran Permendagri 90 Tahun 2019.

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan di diskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten dikecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Penyusunan RKPD Kabupaten Pekalongan tahun 2022 merupakan Tahun ke-1 (satu) pelaksanaan RPJMD tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 belum ditetapkan, maka penyusunan rencana pembangunan tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional (Perpres Nomor 58 Tahun 2017), memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, serta menjaga kesinambungan RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2022 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2022 juga disusun dengan berpedoman kepada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, yang tertuang dalam RKP Tahun 2022 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Hal tersebut sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat dan daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

1) Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur guna menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan

wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3) **Penyederhanaan Regulasi**

Segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan 2 undang - undang dengan pendekatan *omnibus law*. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4) **Penyederhanaan Birokrasi**

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5) **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas,

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut :

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - (2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - (3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - (4) Peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - (5) Pengembangan industri pendukung EBT.

- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - (2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - (3) Penyediaan air untuk pertanian;
 - (4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - (5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - (6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - (2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
 - (3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - (4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - (5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - (2) Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - (3) Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - (4) Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - (5) Peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;

- (2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - (3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - (4) Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
 - (5) Peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- (1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - (2) Peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - (3) Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
 - (4) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - (5) Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - (6) Pengembangan industri halal
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- (1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - (2) Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - (3) pengelolaan impor;
 - (4) Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - (5) Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - (6) Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - (7) Peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
- (1) Peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - (2) Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - (3) Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;

- (4) Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industry pengolahan dan pariwisata;
- (5) Reformasi fiskal; dan
- (6) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- 4) Memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
- 5) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut :

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) percepatan cakupan administrasi kependudukan; (2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - (3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - (4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) sistem jaminan sosial nasional;
 - (2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - (3) perlindungan sosial adaptif; dan
 - (4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - (2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - (3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - (4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - (5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - (2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - (3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - (5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - (2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - (3) kualitas pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - (2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - (3) reforma agraria; dan

(4) perhutanan sosial.

g) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- (1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
- (2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
- (3) peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan
- (4) prestasi olahraga.

4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut :

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
 - (3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - (4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - (5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan

- (6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - (2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - (3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - (4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
 - (5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam
 - (2) perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan
 - (3) dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - (4) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - (5) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - (6) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - (7) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) peningkatan budaya literasi;
 - (2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - (3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - (4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - (2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - (3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - (4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - (5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - (6) waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) konektivitas jalan;
 - (2) konektivitas kereta api;
 - (3) konektivitas laut;
 - (4) konektivitas udara; dan
 - (5) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) transportasi perkotaan;
 - (2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - (3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - (4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - (2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - (3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - (2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan

(3) fasilitas pendukung transformasi digital.

6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - (2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - (3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - (4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penanggulangan bencana; dan
 - (2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - (2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - (3) pengelolaan limbah;
 - (4) pengembangan industri hijau; dan
 - (5) rendah karbon pesisir dan laut.

7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah

akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- b) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- c) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- d) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam **Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas** sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu :
 - (1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - (2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - (3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - (2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
 - (3) peningkatan citra positif di dunia internasional; dan
 - (4) peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global.
- c) Penegakan Hukum Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penataan regulasi;
 - (2) perbaikan sistem hukum pidana dan perdata;
 - (3) penguatan sistem anti korupsi; dan
 - (4) peningkatan akses terhadap keadilan.
- d) Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - (2) transformasi pelayanan publik;
 - (3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - (4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - (1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - (2) penguatan kemampuan pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures (CBM)*;
 - (3) penguatan keamanan laut;
 - (4) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
 - (5) penguatan ketahanan dan keamanan siber.

Isu strategis pembangunan Nasional Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan;
- 2) Lapangan Kerja;
- 3) UMKM;
- 4) Industri;

Untuk mendukung Isu Strategi tersebut diatas Rencana kerja pemerintah (RKP) di tahun 2022 masih mengusung tema “**pemulihan ekonomi dan reformasi struktural**” sesuai dengan tema tersebut. diatas dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 3.1 Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural



Sedangkan untuk mendukung Tema Tersebut diatas pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) strategi dan fokus pembangunan yang meliputi :

- 1) Industri;
- 2) Pariwisata;
- 3) Ketahanan Pangan;
- 4) UMKM;
- 5) Infrastruktur;

- 6) Transformasi Digital;
- 7) Pembangunan Rendah Karbon;
- 8) Reformasi Perlindungan Sosial
- 9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan; dan
- 10) Reformasi Kesehatan.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022 :

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %;
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48;
- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %;
- 6) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104;
- 7) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105;
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %.

2. Tema Dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021 masih mempertimbangkan keberlanjutan pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumber daya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022.

Dengan memperhatikan rencana kebijakan pemulihan dampak COVID-19 di Jawa Tengah dan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022 maka arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 disesuaikan dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Percepatan Pemulihan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM**". dengan prioritas daerah diarahkan pada :

- a) **Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana**, yang difokuskan pada :
 - (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani;
 - (2) Perwuiudan korporasi Petani;

- (3) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
 - (4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
 - (5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
 - (6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
 - (7) Pengembangan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi;
 - (8) Perbaikan iklim dan kepastian Investasi yang semakin kondusif;
 - (9) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
 - (10) Rehabilitasi DAS kritis dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan;
 - (11) Konservasi lingkungan, pengendalian pencemaran air sungai, peningkatan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah serta pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan;
 - (12) Peningkatan kapasitas tampungan air baku melalui pembangunan waduk, embung dan longstorage yang didukung perkuatan pengelolaan irigasi berbasis masyarakat;
 - (13) Peningkatan sarana prasarana penanggulangan banjir, rob dan tanah longsor;
 - (14) Integrasi dokumen perencanaan kebencanaan dengan perencanaan pembangunan;
 - (15) Sinergitas program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan literasi kebencanaan;
 - (16) Penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan;
 - (17) Kemitraan kolaboratif serta peningkatan pembiayaan bersumber dari non Pemerintah.
- b) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang difokuskan pada :**
- (1) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya;
 - (2) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat);

- (3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui koordinasi TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota, sinergitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, penggunaan sumber pembiayaan lain, serta penguatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan BAZNAS;
- (4) Pengurangan pengangguran melalui startup wirausaha, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan tenaga kerja.

c) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing, yang difokuskan pada :

- (1) Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas;
- (2) Pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah, meliputi pengendalian penyakit, penguatan ketahanan kesehatan, penguatan Puskesmas dan pelayanan Rumah Sakit, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pembiayaan kesehatan, digitalisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Peningkatan akses layanan dasar serta pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan perempuan dan anak

d) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, yang difokuskan pada :

- (1) Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), dan membangun pemerintahan yang terbuka (open government);
- (2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- (3) Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
- (4) Mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik;
- (5) Meningkatkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendorong tumbuh kembang iklim inovasi kondusif di masyarakat;
- (6) Penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal;
- (7) Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat;
- (8) Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta

pengecahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Target sasaran makro pembangunan tahun 2022 yang akan dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain meliputi :

- 1) Angka Kemiskinan turun menjadi **11,42-10,27%**;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar **5,96-5,88%**;
- 3) Pertumbuhan Ekonomi antara **3,93-5,20%**;
- 4) Inflasi pada angka **3,0±1**;
- 5) Nilai Tukar Petani **103,56**;
- 6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar **72,43**

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada saat penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, RPJMD Kabupaten Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Strategi (Renstra) 2021 - 2026 belum ditetapkan, maka penyusunan rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, memperhatikan visi misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 Serta RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 yang akan dicapai dalam satu tahun mendatang merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Renstra yang merupakan penjabaran Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten yang dijabarkan kedalam Visi dan Misi Bupati.

Adapun Tujuan dan Sasaran yang merupakan penjabaran dari Visi-misi Bupati yang berhubungan dengan Sekretariat daerah adalah Tujuan dan Sasaran yang terkait dengan **Misi ke 2 (Dua), yaitu Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.**

Maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah dalam Lima Tahun mendatang adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Government) dan Profesional.

Sasaran : - Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatnya kinerja pembangunan dan perekonomian daerah

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sekretariat Daerah untuk mewujudkan Misi Bupati terpilih, maka secara garis besar rumusan

program/ kegiatan Renja sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 3 program dan terdiri dari 19 kegiatan dan 63 Sub Kegiatan.
2. Jumlah usulan dana/ pagu indikatif untuk melaksanakan program/ kegiatan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 total sebesar Rp. 74.929.064.100,00

Kebijakan operasional dalam menunjang terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Pekalongan, dalam Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

a. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

- 1) Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - Penataan Administrasi Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 2) Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- 3) Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, dengan sub kegiatan :
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

b. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub kegiatan :
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 6) Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan sub kegiatan
- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan Mebel
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 8) Kegiatan Penataan Organisasi, dengan sub kegiatan :
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 9) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
- 10) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, dengan sub kegiatan:
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

- 2) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- 3) Kegiatan pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022 Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Nama perangkat daerah : Sekretariat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
04	SEKRETARIAT DAERAH				74.929.064.100				63.920.320.510
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	35.434.886.000			100%	40.399.424.600
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu		100%	82.500.000			100%	95.000.000
4	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu (Renstra dan Renja)	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2 Dokumen	27.500.000	APBD		2 Dokumen	35.000.000
		Jumlah SK Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	6 SK		APBD		6 SK	
4	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja Sekretariat Daerah yang tersusun	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
4	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2 Dokumen	30.000.000	APBD		2 Dokumen	35.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	16.910.000.000			100%	17.450.000.000
4 01 01 2.02 01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	16.500.000.000	APBD		12 Bulan	17.000.000.000
4 01 01 2.02 04	Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Bulan Terpenuhinya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	410.000.000	APBD		12 Bulan	450.000.000
4 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		100%	484.000.000			100%	680.000.000
4 01 01 2.05 03	Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan terpenuhinya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	119.000.000	APBD		12 Bulan	250.000.000
4 01 01 2.05 09	Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	15 Pegawai	155.000.000	APBD		15 Pegawai	200.000.000
4 01 01 2.05 10	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	320 Orang	100.000.000	APBD		320 Orang	110.000.000
4 01 01 2.05 11	Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	100 Orang	110.000.000	APBD		100 Orang	120.000.000
4 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	3.025.000.000			100%	3.316.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.06 01	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Komponen Listrik/Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	110.000.000	APBD		12 Bulan	150.000.000
4 01 01 2.06 02	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	510.000.000	APBD		12 Bulan	545.000.000
4 01 01 2.06 03	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bulan terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	250.000.000	APBD		12 Bulan	275.000.000
4 01 01 2.06 05	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Cetak Penggandaan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	135.000.000	APBD		12 Bulan	146.000.000
4 01 01 2.06 08	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Terpenuhinya Fasilitas Kunjungan Tamu	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.070.000.000	APBD		12 Bulan	1.100.000.000
4 01 01 2.06 09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	76 Kali	900.000.000	APBD		76 Kali	1.000.000.000
4 01 01 2.06 10	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis dan inaktif yang dikelola dalam satu tahun	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2500 Dokumen	50.000.000	APBD		2500 Dokumen	100.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.740.000.000			100%	3.750.000.000
4 01 01 2.07 02	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	7 Unit	560.000.000	APBD		7 Unit	2.700.000.000
4 01 01 2.07 05	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	30 Unit	280.000.000	APBD		30 Unit	300.000.000
4 01 01 2.07 06	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	59 Unit	900.000.000	APBD		59 Unit	750.000.000
4 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.918.000.000			100%	4.311.300.000
4 01 01 2.08 01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	175.000.000	APBD		12 Bulan	200.000.000
4 01 01 2.08 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.183.000.000	APBD		12 Bulan	1.301.300.000
4 01 01 2.08 03	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	600.000.000	APBD		12 Bulan	660.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.08 04	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	74 Orang	1.960.000.000	APBD		74 Orang	2.150.000.000
4 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.687.386.000			100%	3.855.124.600
4 01 01 2.09 01	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	677.386.000	APBD		12 Bulan	745.124.600
4 01 01 2.09 02	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.200.000.000	APBD		12 Bulan	1.320.000.000
4 01 01 2.09 05	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Mebel	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	60.000.000	APBD		12 Bulan	70.000.000
4 01 01 2.09 06	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	750.000.000	APBD		12 Bulan	820.000.000
4 01 01 2.09 09	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.000.000.000	APBD		12 Bulan	900.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.11	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	2.139.000.000			100%	3.194.000.000
4 01 01 2.11 01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.089.000.000	APBD		12 Bulan	2.079.000.000
4 01 01 2.11 04	Sub kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Bulan Pemenuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	1.050.000.000	APBD		12 Bulan	1.115.000.000
4 01 01 2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	1.440.000.000			100%	1.583.000.000
4 01 01 2.12 01	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	860.000.000	APBD		12 Bulan	950.000.000
4 01 01 2.12 02	Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	580.000.000	APBD		12 Bulan	633.000.000
4 01 01 2.13	Kegiatan Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik		100%	1.459.000.000			100%	1.560.000.000
4 01 01 2.13 01	Sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen kelembagaan, Anjab dan ABK yang tersusun	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Dokumen	350.000.000	APBD		3 Dokumen	350.000.000
4 01 01 2.13 02	Sub kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Dokumen	354.000.000	APBD		3 Dokumen	400.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2.13 03	Sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Dokumen	250.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
4 01 01 2.13 04	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	250.000.000
4 01 01 2.13 05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen SAKIP tingkat Pemkab yang tersusun	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Dokumen	305.000.000	APBD		4 Dokumen	310.000.000
4 01 01 2.14	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi		100%	550.000.000			100%	605.000.000
4 01 01 2.14 01	Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan Protokol Pimpinan yang terfasilitasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	140 Kali	150.000.000	APBD		140 Kali	165.000.000
4 01 01 2.14 02	Sub kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
4 01 01 2.14 03	Sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah bulan terpenuhinya pendokumentasian kegiatan Pimpinan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	200.000.000	APBD		12 Bulan	220.000.000
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	a. Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan		100%	35.954.178.100			100%	20.044.895.910

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi		100%				100%	
		c. Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangn		100%				100%	
		d. Prosentase usulan/permohonan kerja sama yang difasilitasi		100%				100%	
4	01 02 2.01	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100%	1.080.000.000			100%	1.180.000.000
4	01 02 2.01 01	Sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen kajian di bidang pemerintahan	1 Dok	150.000.000	APBD		1 Dok	200.000.000
4	01 02 2.01 02	Sub kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan	2 Dok	400.000.000	APBD		2 Dok	400.000.000
4	01 02 2.01 03	Sub kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen Laporan Penerapan dan evaluasi SPM, dokumen LPPD, dokumen PAW, dokumen memori jabatan yang tersusun	3 Dok	530.000.000	APBD		3 Dok	580.000.000
			Penyusunan dokumen LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran	1 Jenis		APBD		1 Jenis	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 02 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/hibah yang terfasilitasi		100%	33.817.178.100			100%	17.684.895.910
4 01 02 2.02 01	Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan dan koordinasi dalam fasilitasi keagamaan dan lembaga keagamaan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Keg	3.817.217.100	APBD		4 Keg	4.198.938.810
4 01 02 2.02 02	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyarakat, individu dan keluarga penerima hibah dan bantuan sosial	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Keg	28.370.000.000	APBD		4 Keg	11.693.000.000
4 01 02 2.02 03	Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Keg	1.629.961.000	APBD		3 Keg	1.792.957.100
4 01 02 2.03	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah		100%	827.000.000			100%	890.000.000
4 01 02 2.03 01	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kajian atas permasalahan Peraturan perundang-undangan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	5 buah	345.000.000	APBD		5 buah	360.000.000
		Jumlah produk hukum yang disinkronisasi dan harmonisasi		60 Perda/Perbup				60 Perda/Perbup	
		Tersusunnya propemperda/ propemperbup		2 Dok				2 Dok	
4 01 02 2.03 02	Sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Fasilitasi penanganan perkara litigasi dan non litigasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Perkara	332.000.000	APBD		4 Perkara	365.000.000
		Prosentase pemberian bantuan hukum bagi warga miskin melalui LBH		40 Perkara				40 Perkara	

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM		4 Dok				4 Dok	
		Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum		357 Orang				357 Orang	
4	01 02 2.03 03	Sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	3 Perda/Perbup	150.000.000	APBD		3 Perda/Perbup	165.000.000
		Jumlah Perda dan Perbup yang didistribusikan		150 Perda/Perbup				150 Perda/Perbup	
		Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk Hukum Daerah		12 Bulan				12 Bulan	
		Jumlah Himpunan Produk Hukum Daerah yang dibuat		340 Buku				340 Buku	
04	01 02 2.04	Kegiatan Fasilitas Kerjasama Daerah		100%	230.000.000			100%	290.000.000
04	01 02 2.04 01	Sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	20 Naskah	200.000.000	APBD		20 Naskah	250.000.000
04	01 02 2.04 02	Sub kegiatan Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Kegiatan	30.000.000	APBD		1 Kegiatan	40.000.000
4	01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		a. Persentase kenaikan deviden dari BUMD	5%	3.540.000.000		5%	3.476.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		b. Persentasi ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan		100%				100%	
		c. Persentase pengadaan barang dan jasa melalui UKPBJ yang tepat waktu		100%				100%	
		d. Persentase ketersediaan dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan SDA		100%				100%	
4	01 03 2.01	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100%	435.000.000			100%	475.000.000
4	01 03 2.01 01	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	33 Kegiatan	120.000.000	APBD	33 Kegiatan	130.000.000
4	01 03 2.01 02	Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPID yang dilaksanakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Kegiatan	250.000.000	APBD	4 Kegiatan	275.000.000
4	01 03 2.01 03	Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPAKD yang dilaksanakan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Kegiatan	65.000.000	APBD	4 Kegiatan	70.000.000
4	01 03 2.02	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan fisik seluruh OPD		100%	580.000.000		100%	610.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.02 01	Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Surat Keputusan (SK) Bupati tentang penunjukan PA dan KPA pada Perangkat Daerah dan Surat Keputusan (SK) Sekda tentang Tim Pengelola Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	9 SK	35.000.000	APBD		9 SK	40.000.000
4 01 03 2.02 02	Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Bulan yang Terpenuhi Dalam Rangka Koordinasi, Pengendalian, Evaluasi, Percepatan dan Pelaporan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/ Kota, DAK dan Tugas Pembantuan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan	262.000.000	APBD		12 Bulan	270.000.000
4 01 03 2.02 03	Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD, Bantuan Keuangan Kab/Kota, DAK, Tugas Pembantuan, Urusan Bersama dan Dekonsentrasi	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Dokumen	283.000.000	APBD		4 Dokumen	300.000.000
		Jumlah dokumen Visualisasi hasil pembangunan Kabupaten Pekalongan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Dokumen		APBD		1 Dokumen	
		Update data pelaporan (SIMPEL) kegiatan APBD	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	12 Bulan		APBD		12 Bulan	
4 01 03 2.03	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesainya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. Pengadaan Barang dan Jasa		100%	2.100.000.000			100%	1.926.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Rencana tahun 2022 (tahun rencana)				Catatan penting	Perkiraan maju rencana tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target capaian kinerja	Kebutuh an dana/ pagu indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2.03 01	Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bag. PBJ	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	195 Paket	1.500.000.000	APBD		195 Paket	1.500.000.000
4 01 03 2.03 02	Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pengelolaan aplikasi sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	1 Dokumen	450.000.000	APBD		1 Dokumen	276.000.000
4 01 03 2.03 03	Sub kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah peserta pembinaan pelaku pengadaan barang/ jasa	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	425 Orang	150.000.000	APBD		425 Orang	150.000.000
4 01 03 2.04	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev		100%	425.000.000			100%	465.000.000
4 01 03 2.04 01	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	2 Kegiatan	300.000.000	APBD		2 Kegiatan	330.000.000
4 01 03 2.04 02	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Kegiatan	55.000.000	APBD		4 Kegiatan	60.000.000
4 01 03 2.04 03	Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev kebijakan dibidang Energi dan Air	Kantor Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan	4 Kegiatan	70.000.000	APBD		4 Kegiatan	75.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA PROGRAM KEGIATAN DAN NOMENKLATUR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan dokumen satu tahunan sebagai dasar dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program - program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Renja ini mengacu pada pemetaan nomenklatur yang telah disusun sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Nomenklatur Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan serta Pendanaan Indikatif
sektretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	7 unit	100 %	560,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	2,700,000,000
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jumlah Pengadaan Mebel	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	30 unit	100 %	280,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	300,000,000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpenuhi	Persentase Ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	59 unit	100 %	900,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	750,000,000
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,743,000,000				4,111,300,000		
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	1,183,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	1,301,300,000
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	660,000,000
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Orang Pengadaan Jasa Pelayanan Umum	Prosentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	74 orang	100 %	1,960,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	2,150,000,000
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,687,386,000				3,855,124,600		
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	677,386,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	745,124,600
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	1,320,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Tata Pemerintahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT														
4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan													
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	Jumlah dokumen kajian di bidang pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 dokumen	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	100 -	200,000,000
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	Jumlah Dokumen administrasi kewilayahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 dokumen	100 %	400,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	100 -	400,000,000
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	Jumlah dokumen Laporan Penerapan dan evaluasi SPM, dokumen LPPD, dokumen PAW, dokumen memori jabatan yang tersusun	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 dokumen 1 Jenis	100 %	530,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase pemenuhan fasilitasi bidang tata kelola pemerintahan	100 -	580,000,000
4	01	02	2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah													
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Prosentase usulan/permohonan kerja sama yang difasilitasi	Jumlah naskah kerja sama dalam negeri yang terfasilitasi	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	20 naskah	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase usulan/permohonan kerja sama yang difasilitasi	100 -	250,000,000
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Prosentase usulan/permohonan kerja sama yang difasilitasi	Jumlah fasilitasi kerja sama luar negeri	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	1 kegiatan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Prosentase usulan/permohonan kerja sama yang difasilitasi	100 -	40,000,000
TOTAL												1,310,000,000					1,470,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
4	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	320 Orang	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	110,000,000
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketercapaian Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	100 Orang	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	120,000,000
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	02	2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum														
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kajian atas permasalahan Peraturan Perundang-undangan Jumlah produk hukum yang disinkronisasi dan harmonisasi tersusunnya propemperda/propemperbup	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	5 buah 60 Perda/Perbup 2 Dokumen	100 %	345,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 -	360,000,000
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Fasilitasi penanganan perkara litigasi dan non litigasi Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum Pemenuhan data laporan Aksi HAM dan penilaian Peduli HAM Presentase pemberian bantua hukum bagi warga miskin melalui LBH	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 Perkara 357 Orang 4 Dokumen 40 Perkara	100 %	332,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 -	365,000,000
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk Hukum Daerah Jumlah Himpunan Produk Hukum daerah yang dibuat Jumlah Perda dan Perbup yang didistribusikan Jumlah Perda dan Perbup yang disosialisasikan	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	12 Bulan 340 buku 150 Perda/Perbup 3 Perda/Perbup	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Produk hukum Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 -	165,000,000
TOTAL												1,037,000,000					1,120,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Organisasi dan Kepegawaian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	3 Dokumen	100 %	354,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	400,000,000
4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	1 Dokumen	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	250,000,000
4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	1 Dokumen	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	250,000,000
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen saking tingkat Pemkab yang tersusun	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	4 dokmen	100 %	305,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	310,000,000
TOTAL									1,983,000,000					2,335,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Pembangunan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
TOTAL									637,500,000					680,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT															
4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat														
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah kegiatan dan koordinasi dalam fasilitasi keagamaan dan lembaga keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 keg	100 %	3,817,217,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 -	4,198,938,810
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah badan/lembaga, ormas, kelompok masyarakat, individu dan keluarga penerima hibah dan bantuan sosial	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 keg	100 %	28,370,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 -	11,693,000,000
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi dalam kegiatan kesejahteraan masyarakat	Persentase kegiatan keagamaan dan bantuan sosial/ Hibah yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	3 keg	100 %	1,629,961,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100 -	1,792,957,100
TOTAL												33,817,178,100						17,684,895,910

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Perekonomian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01	SEKRETARIAT DAERAH															
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN														
4	01	03	2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian													
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah pembinaan dan evaluasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan	Prosentase kebijakan Perekonomian Daerah yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	33 Kegiatan	100 %	120,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	5 %	130,000,000
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPID yang dilaksanakan	Prosentase kebijakan Perekonomian Daerah yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	4 Kegiatan	100 %	250,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	5 %	275,000,000
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah fasilitasi dan koordinasi TPAKD yang dilaksanakan	Prosentase kebijakan Perekonomian Daerah yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	4 Kegiatan	100 %	65,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	5 %	70,000,000
4	01	03	2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam													
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan movev kebijakan dibidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	2 Kegiatan	100 %	300,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	100 -	330,000,000
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan movev kebijakan dibidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 Kegiatan	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	100 -	60,000,000
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	Jumlah pelaksanaan kegiatan movev kebijakan dibidang Energi dan Air	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan movev	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 -	4 Kegiatan	100 %	70,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase kenaikan dividen dari BUMD	100 -	75,000,000
TOTAL												860,000,000				940,000,000	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Protokol

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																
4	01	SEKRETARIAT DAERAH																
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
4	01	01	2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan														
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Protokol pimpinan yang terfasilitasi	Prosentase kagiatan keprotokolan yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	140 kali	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	165,000,000
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Prosentase kagiatan keprotokolan yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	220,000,000
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pendokumentasian kegiatan Pimpinan	Prosentase kagiatan keprotokolan yang terfasilitasi	Kab. Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	--	12 bulan	100 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketercapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	--	220,000,000
TOTAL												550,000,000					605,000,000	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022. Substansi Renja disusun sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, yaitu memuat kebijakan, program, kegiatan dan lokasi kegiatan dalam pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2022 disusun terukur dengan berpedoman pada arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Sekretariat Daerah atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian target yang telah ditetapkan.
3. Bagian - Bagian dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Sekretariat Daerah, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2022.

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2022 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Sekretariat Daerah. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022, selain dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai juga diperlukan kompetensi, semangat, tekad dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu Renja Sekretariat Daerah juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Sekretariat Daerah ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

Kajen, 30-Jul-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631224 199103 1 004